

LAPORAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Untuk Bahan Penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir
Masa Jabatan (LKPJ) dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir
Masa Jabatan (LPPD)
Tahun 2018



DISUSUN OLEH:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jln. M.Ocet Thalib 01 Praya Telp. (0370) 655144

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
Nip : 19671231 199203 1 117
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa data/informasi yang terdapat dalam laporan SKPD ini telah diverifikasi dan dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, Januari 2019
Kepala dinas LingkunganHidup
Kabupaten Lombok Tengah

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671231 199203 1 117

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Surat pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup	ii
Daftar isi.....	iii
Daftar tabel.....	iv
A. BAB I PENDAHULUAN	1
A.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	2
A.2 Struktur Organisasi SKPD dan DUK SKPD	8
B. BAB II PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN	14
B.1. Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2018	14
B.2. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan	16
B.3. Capaian Kinerja Sasaran Urusan.....	28
C. PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup	2
Tabel 1.2 Lokasi Titik Pantau Sumber Air dan Media Lingkungan	4
Tabel 1.3 Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2018	5
Tabel 1.4 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2018	5
Tabel 1.5 Layanan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)	6
Tabel 1.6 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2018	7
Tabel 1.7 Register Pegawai Dinas Lingkungan Hidup per Desember 2018	10
Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018	14
Tabel 2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabel Capaian Kinerja Sasaran	27
Tabel 2.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran	28

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu instansi yang menangani urusan lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam misi Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada misi ke-4 (empat) antara lain mencegah semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai misi tersebut adalah bagaimana memperbaiki dan mempertahankan kualitas lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan, ekonomi dan keadilan sosial. Karena itu pembangunan bidang lingkungan hidup harus dilaksanakan secara seimbang dan terintegrasi dengan pembangunan bidang ekonomi dan sosial.

Eksplorasi sumber daya alam yang hanya berorientasi ekonomi hanya membawa efek positif secara ekonomi tetapi menimbulkan efek negatif bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu pembangunan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek etika dan sosial yang berkaitan dengan kelestarian serta kemampuan dan daya dukung sumber daya alam. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Berbagai persoalan yang menjadi fokus perhatian antara lain Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup. Untuk mengetahui target kinerja dan program kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada rencana kinerja utama yang dijabarkan pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU).

A.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI SAAT INI 2015	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHIR
				1	2	3	4	5	
1	Terpantaunya tingkat pencemaran lingkungan meliputi air, udara dan tanah	Pemantauan kualitas air permukaan	9 titik	10 titik	12 titik	14 titik	16 titik	18 titik	18 Titik
		Pemantauan kualitas udara embien		4 Titik	4 Titik	4 Titik	4 Titik	4 Titik	4 Titik
2	Terlaksananya penanganan pengaduan dan Pengawasan izin lingkungan	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan	20 usaha/ kegiatan	20	20	20	20	20	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3	Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan (amdal, UPL/UKL dan SPPL)	1.037	500 dok	500 dok	500 dok	500 dok	500 dok	2500 dokumen
4	Penurunan laju kerusakan LH yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, serta ekosistem pesisir dan laut	Perlindungan dan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	25 lokasi
		Pengendalian dan konservasi SDA	19 ha	25 ha	25 ha	25 ha	25 ha	25 ha	125 ha

Penjelasan capaian target kinerja :

1. Terpantaunya tingkat pencemaran lingkungan meliputi air, udara dan tanah

Sumber-sumber air seperti sungai, danau/bendungan/embung dan sumber-sumber air lainnya memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di Kabupaten Lombok Tengah, air sungai dan danau/bendungan/embung selain dijadikan sebagai sumber air minum bagi sebagian masyarakat Lombok Tengah, juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Akan tetapi, disisi lain, sumber-sumber air tersebut sering dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Mengingat peran strategisnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, ditugaskan untuk memantau kualitasnya, menetapkan dan menginformasikan status mutu air dari berbagai sumber-sumber air tersebut yang menjadi kewenangannya memiliki 94 sungai dan 3 lokasi sumber air di kabupaten.

Pada Tahun 2018 jumlah sungai yang dipantau mutu airnya sebanyak 9 sungai, 1 embung dan 2 bendungan atau sekitar 9,57 % dari total 94 sungai yang ada, pada tahun 2018 jumlah sungai yang dipantau mutu airnya bertambah 1 lokasi dan embung 1 lokasi. Pengukuran parameter dalam pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada beberapa lokasi atau titik sampling yang ditentukan dengan pertimbangan aspek peruntukan sungai atau air sungai pada lokasi tersebut. Pemantauan kualitas air dilakukan pada 12 lokasi atau 12 titik sampling untuk masing-masing sungai dan sumber air sebagai berikut :

Tabel 1.2
Lokasi Titik Pantau Sumber Air dan Media Lingkungan

No.	Lokasi Pemantauan	Jenis Media Lingkungan	Jumlah Titik Pantau (Lokasi Pengambilan Sampel)	Target Jumlah Titik Pantau (Lokasi Pengambilan Sampel)	Capaian (%)
1	Sungai Lajut	Air	1	3	53,33%
2	Sungai Surabaya	Air	1	3	
3	Sungai Manhal	Air	1	3	
4	Sungai Srigangga	Air	1	3	
5	Sungai Semparu	Air	1	3	
6	Sungai Keraning	Air	1	3	
7	Sungai Puyung	Air	1	3	
8	Sungai Leneng	Air	1	3	
9	Sungai Gerintuk	Air	1	0	
10	Embung Muncan	Air	1	1	
11	Bendungan Batujai	Air	1	1	
12	Bendungan Batu Tulis	Air	1	0	
13	Perkantoran	Udara	1	1	
14	Pemukiman	Udara	1	1	
15	Pasar Renteng	Udara	1	1	
16	Kawasan Industri	Udara	1	1	

2. Terlaksananya penanganan pengaduan dan Pengawasan izin lingkungan

a. Pengawasan izin lingkungan

Jumlah perusahaan yang wajib AMDAL yang diawasi terus meningkat, namun belum mampu menjangkau seluruh perusahaan wajib AMDAL. Sampai dengan tahun 2018 jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi sebanyak 3 usaha dan/atau kegiatan atau sekitar 37,5% dari total wajib AMDAL. Pencapaian ini disebabkan karena kebanyakan usaha dan/atau kegiatan wajib amdal tersebut masih dalam tahap konstruksi. Demikian halnya dengan perusahaan yang wajib UKL-UPL yang diawasi terus meningkat, namun belum mampu menjangkau seluruh perusahaan wajib UKL-UPL. Pada tahun 2016 jumlah perusahaan wajib UKL-UPL yang diawasi sebanyak 60 usaha dan/atau kegiatan atau sekitar 16 % dari total wajib UKL-UPL, kemudian meningkat menjadi 91 usaha dan/atau kegiatan pada tahun 2017, atau sekitar 20 % dari total wajib UKL-UPL dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 176 usaha dan/atau kegiatan atau 33%.

Tabel 1.3
 Persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan
 Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Lingkungan	Persentase (%)
1.	s/d 2016	60	374	16
2.	2017	91	456	20
3.	2018	178	540	33

b. Layanan penanganan pengaduan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan terakselerasinya pembangunan berbagai sektor khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah, maka sengketa lingkungan antar masyarakat/organisasi juga semakin meningkat. Peningkatan sengketa lingkungan ini, tergambar dari semakin meningkatnya pengaduan kasus lingkungan. Pada tahun 2016 jumlah pengaduan kasus lingkungan yang diterima dan ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 5 kasus meningkat menjadi 11 kasus pada tahun 2017 dan 15 kasus pada tahun 2018. Kasus-kasus lingkungan yang ada dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semuanya telah ditindak lanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan trend peningkatan jumlah pengaduan kasus lingkungan, maka pada tahun 2019 jumlah kasus lingkungan di Kabupaten Lombok Tengah akan semakin banyak dan semakin beragam.

Tabel 1.4
 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan
 Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang ditangani	Persentase (%)
1	2016	5	5	100
2	2017	11	11	100
3	2018	15	15	100

3. Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Layanan rekomendasi kelayakan lingkungan diberikan kepada masyarakat dunia usaha yang membutuhkan rekomendasi kelayakan lingkungan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan. Selama kurun waktu 2009-2018, jumlah rekomendasi

kelayakan lingkungan yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 532 dokumen.

Tabel 1.5
Layanan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)

No	Jenis Rekomendasi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jmlh
1	UKL UPL	8	12	40	37	48	56	107	66	78	80	532
2	AMDAL	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8
3	SPPL				37	720	1.027	962	1.122	823	626	5.317

4. Penurunan laju kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, serta ekosistem pesisir dan laut

a. Perlindungan dan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

Kegiatan ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam perlindungan mata air dengan pembentukan kampung iklim dan pembuatan talud disekitar mata air. Pembentukan kampung iklim diharapkan menjadi langkah awal dalam mewujudkan peranserta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berwawasan lingkungan. Pada tahun 2018 telah dilakukan sosialisasi program kampung iklim di 10 desa. Kegiatan perlindungan mata air dimaksudkan untuk menjaga agar lokasi sumber mata air tetap terjaga, menghindari kerusakan mata air dari tanah longsor dan pencemaran air. Kegiatan ini dilakukan melalui pembuatan talud disekitar titik mata air. Pada tahun 2018 kegiatan pengamanan mata air ini dilakukan di 3 lokasi mata air.

b. Pengendalian dan konservasi SDA

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penanaman bibit pohon pelindung di lahan-lahan kritis seperti lokasi bekas tambang galian, daerah resapan air dan daerah rawan bencana. Pada tahun ini telah dilaksanakan penanaman bibit pohon sebanyak 2.500 batang dengan cakupan lahan seluas 16 Ha.

Dari uraian di atas maka realisasi IKU yang dicapai pada tahun 2018 seperti pada tabel 1.6. berikut :

Tabel 1.6.
 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2018

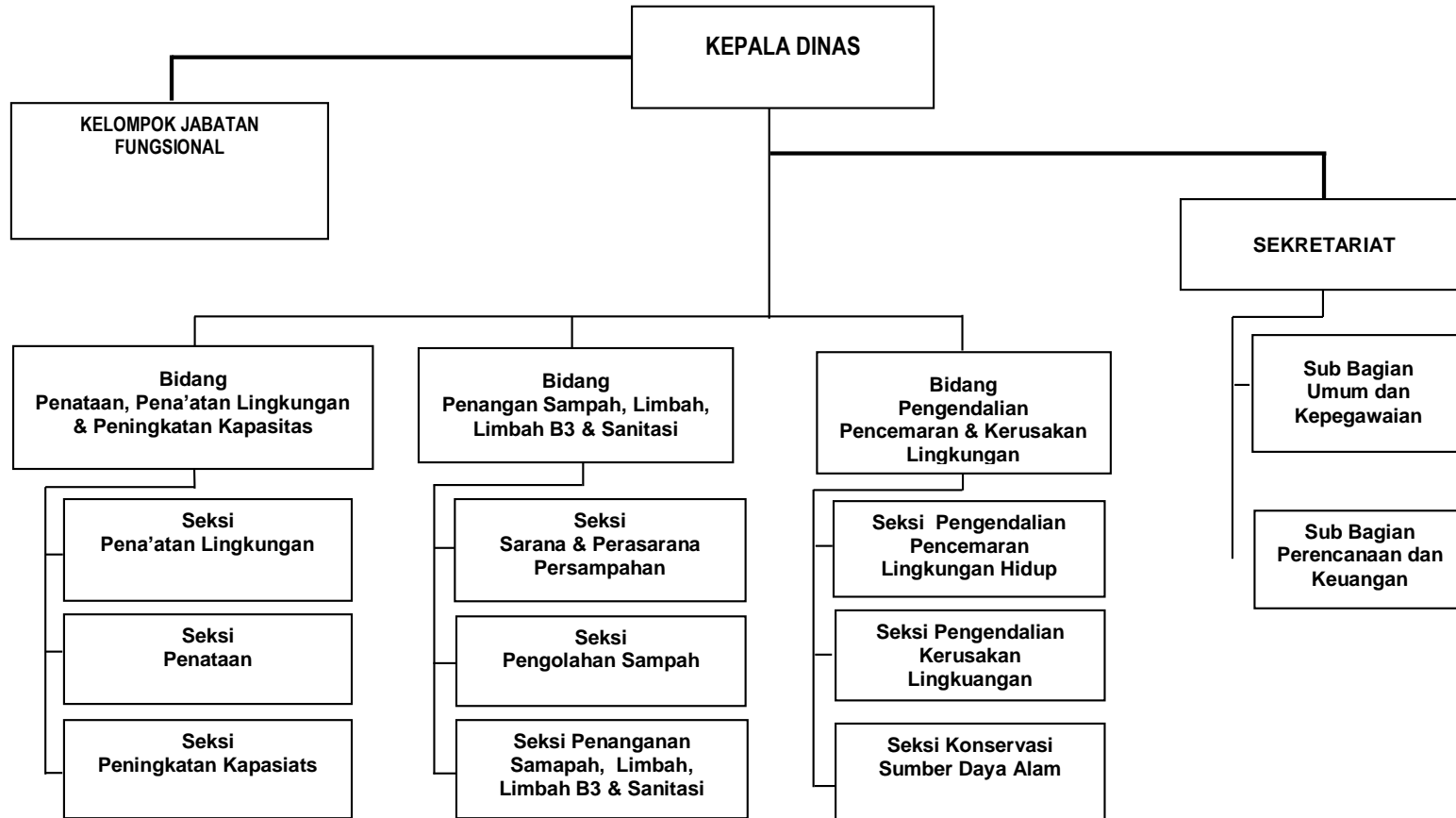
No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018
1	Terpantaunya tingkat pencemaran lingkungan meliputi air, udara dan tanah	Pemantauan kualitas air permukaan	14 titik	12 Titik
		Pemantauan kualitas udara embien	4 Titik	4 Titik
2	Terlaksananya penangan pengaduan dan Pengawasan izin lingkungan	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan	85	87
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%
3	Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan (amdal, UPL/UKL dan SPPL)	500 dokumen	626 dokumen
4	Penurunan laju kerusakan LH yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, serta ekosistem pesisir dan laut	Perlindungan dan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	5 lokasi	3 lokasi
		Pengendalian dan konservasi SDA	19 ha	16 ha

A.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
3. Bidang Penataan, Pena'atan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas membawahi :
 - 1) Seksi Penataan lingkungan;
 - 2) Seksi Pena'atan;
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas.
4. Bidang Penanganan Sampah, Limbah, Limbah B3 dan Sanitasi membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan;
 - 2) Seksi pengolahan persampahan;
 - 3) Seksi Penanganan sampah, limbah, limbah B3 dan Sanitasi.
5. Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pengendalian Kerusakan lingkungan;
 - 3) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Daftar Urut Kepangkatan Dinas Lingkungan Hidup

a. Register Kepegawaian

Tabel. 1.7
Register Pegawai Dinas Lingkungan Hidup per Desember 2018

NO	NAMA	L/P	GOL	Eselon	JABATAN	Pendidikan terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
1	Ir.LALU RAHADIAN, M.Si.	L	IV/c	II. B	Kepala Dinas	S2. Ilmu Pengel.SDA & Lingk	PIM III	
2	Drs.LALU SUDIARTHA	L	IV/a	III. A	Sekretaris	S1. Pendidikan	PIM III	
3	ADAM ASMADIA, S.Pt., M.Si.	L	IV/a	IV. A	KASI. PENATAAN	S2. Manajemen	ADUM	
4	Ir.LALU WIDIARTA	L	IV/a	III. B	KABID. PENATAAN, PENATAAN LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	S1. Pertanian	ADUM	
5	SURANTO, S.P.	L	IV/a	III. B	KABID. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	S1. Pertanian	PIM IV	
6	LALU MAKSUM SUPARDI, S.Sos., M.M.	L	IV/a	III. B	KABID. PENANGANAN SAMPAH, LIMBAH, LIMBAH B3 DAN SANITASI	S2. Ekonomi Pembangunan	ADUM	
7	H. HAERUL	L	III/d	IV. A	KASI. PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	S1. Biologi	ADUM	
8	Ir.LALU YUDIA RATMAYADI	L	III/d	IV. A	KASI. SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN	S1. Pertanian	PIM IV	
9	SANUSI, A.MKL., S.T	L	III/d	IV. A	KASI. PENINGKATAN KAPASITAS	S1. Teknik Lingkungan	PIM IV	
10	AGUS NURSILOWATI	P	III/d	IV. A	KASI. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	SLTA	ADUM	
11	LALU MUHAMAD RIFAI, S.Pt.	L	III/d	IV. A	KASI. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	S1 Peternakan	PIM IV	
12	LALU MA`AS SOLIHIN, S.T., M.ENG.	L	III/d	IV. A	KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN	S2 Engenering		
13	LALU ALWAN, S.P.	L	III/d	IV. A	KASI. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	S1 Pertanian		
14	KIAHMAD, S.T.	L	III/c	IV. A	KASI. PENATAAN LINGKUNGAN	S1 Teknik Sipil		
15	LALU MUHAMADUN,S.Si	L	III/c	IV. A	KASI. PENANGANAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN SANITASI	S1. Biologi		
16	AHMAD	L	III/b	IV. A	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SMA		
17	MUHAMAD NUR`ARIF, S.P., M.Si.	L	IV/a	----	FUNGSIONAL UMUM SEKSI PENATAAN	S2. Lingkungan	ADUM	
18	BAIQ ISTIHARINI, S.KM.	P	III/d	----	PRANATA LAB. KESEHATAN PENYELIA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	S1 Kesehatan Masyarakat		
19	LALU GUNAWAN SATRIA ABDI, S.T.	L	III/b	----	PENGAWAS AIR BERSIH SEKSI LIMBAH, LIMBAH B3 DAN SANITASI	S1 Teknik		
20	BAIQ NURHAYATI	P	III/b	----	PENGADMINISTRASI UMUM BIDANG PENANGANGAN SAMPAH, LIMBAH, LIMBAH B3 DAN SANITASI	SMA		

21	MAULUDIYAH, S.T.	P	III/b	----	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS	S1. Teknik Lingkungan		
22	LALU WIRAHADISURYA, S.T.	L	III/b	----	PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	S1. Teknik Lingkungan		
23	MUHAMMAD WIRAHADI, S.T.	L	III/b	----	PENGAWAS SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	S1. Teknik		
24	MUNAWIR, S.Si.	L	III/b	----	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN SEKSI PENAATAAN	S1. Teknik Lingkungan		
25	HERY GUSTAF SORENGGANA, SP.	L	III/b	----	STAF SUB. BAG. KEUANGAN DAN PERENCANAAN	S1. Pertanian		
26	JANE SRI WINDARI, S.IP.	P	III/b	----	BENDAHARA GAJI SUB. BAG. KEUANGAN DAN PERENCANAAN	S1. Hubungan Internasional		
27	LALU LUKMANUL HAKIM, A.MKL.	L	III/a	----	SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	DIII- Kesehatan		
28	KAMARUDIN	L	III/a	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMA		
29	LALU HERNAN	L	III/a	----	PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA SEKSI PENATAAN	SMA		
30	RAHIMAN, S.H.	L	III/a	----	PENGUMPUL/PENGOLAH DATA SEKSI PENAATAN	S1. Hukum		
31	MOHAMAD SAHDI, S.T.	L	III/a	----	PENGAWAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	S1. Teknik		
32	JAMIL	L	III/a	----	PENGEMUDI SEKRETARIAT	SMA		
33	RAMIUN	L	II/c	----	CARAKA SUB.BID UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SMA		
34	SAEFULLAH	L	II/c	----	PENGAWAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMA		
35	HARTAWAN BUKHARI	L	II/c		PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	SMA		
36	LALU ERWIN HURDANI	L	II/b	----	PENYAPU PASAR RENTENG SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMA		
37	LALU HASIM KATAMSI	L	II/b	----	BENDAHARA/PENGURUS BARANG SUB.BID UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SMA		
38	BAHRUN	L	II/b	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMA		
39	ZAENAL ARIFIN	L	II/b	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMA		
40	WAZOHIRI	L	II/b	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMP		
41	BAIQ MASRANTOWATI	P	II/b	----	OPERATOR KOMPUTER SEKSI KSDA	SLTA/TATA BOGA		
42	ABIDIN	L	II/b	----	PENGAWAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMA		
43	SUPRIADI	L	II/b	----	PENGAWAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMA		
44	JUNAIDI	L	II/b	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMA		
45	BAIQ HERAWATI	P	II/b	----	BENDAHARA PENGELUARAN SUB.BAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SMA/TATA NIAGA		
46	HERLIN INDRA SUARI	P	II/a	----	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUB.BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	SMA		

48	SUHARDIMAN	L	II/a	----	PENGEMUDI SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMP		
49	DEDY ARMIADI	L	I/d	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMP		
50	MUHTAR	L	I/d	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MTs		
51	SUMENAH	L	I/d	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MTs		
52	NAZRI ASMAN	L	I/d	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SMP		
53	ZAENUDIN	L	I/d	----	PENGAWAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MTs		
54	SULAEMAN	L	I/d	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MTs		
55	SHALATIAH	P	I/d	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MTs		
56	TAHIR	L	I/c	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
57	SLAMET	L	I/c	----	PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
58	SUPARDAN	L	I/c	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
59	NURSAM	L	I/c	----	FUNGSIONAL UMUM	SD		
60	BUSAIRI	L	I/c	----	FUNGSIONAL UMUM	SD		
61	HERLAN	L	I/b	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
62	RUSTAM	L	I/b	----	PENGADMINISTRASI UMUM	SD		
63	MUSTAKIM	L	I/b	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MI		
64	SITI AISYAH	P	I/b	----	PENGADMINISTRASI UMUM	MI		
65	AZHAR	L	I/b	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MI		
66	MAKYAH	P	I/b	----	PENGADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT	SD		
67	SAHRAN	L	I/b	----	FUNGSIONAL UMUM	Paket A		
68	IZUL PALAH	L	I/b	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MI		
69	LALU MURSID	L	I/b	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
70	MUHDIN	L	I/b	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
71	SALEH	L	I/b	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Paket A		
72	AKHYAR ROSYIDI	L	I/b	----	PENGEMUDI DUMP TRUK SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MI		
73	SITI HADIJAH	P	I/b	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		

74	SAIFUL HADI	L	l/b	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
75	AHYAR	L	l/b	----	SOPIR PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
76	HAMIDAN	L	l/b	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
77	SAHRUN	L	l/a	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
78	HAPIZ	L	l/a	----	PETUGAS KEBERSIHAN SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	SD		
79	SYAMSURRIJAL	L	l/a	----	PENGANGKUT SAMPAH SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	MI		

Praya, Desember 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,

Ir.LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031 117

BAB II
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

B.1. Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018

Tabel 2.1.
Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

No	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	Jenis Belanja			Jumlah pagu	Realisasi					
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	Anggaran	Pegawai	Barang dan Jasa	Modal	Jumlah	Fisik	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	Gaji dan Tunj.karyawan/ti LH Kab.Loteng	4.543.813.161			4.543.813.161	4.453.439.518				4.453.439.518	100
B	Pelayanan Program Perkantoran										
1	Penyedia Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	-	45.930.000	-	45.930.000	-	35.267.607	-	35.267.607	100,00	
2	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	42.760.000	16.735.000	-	59.495.000	41.680.000	16.735.000		58.415.000	100,00	
3	Penyediaan Alat Tulis kantor		50.325.200		50.325.200		50.300.000		50.300.000	100,00	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	11.044.000	68.582.000	79.626.000		11.044.000	68.325.000	79.369.000	100,00	
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	85.000.000	-	85.000.000		85.000.000		85.000.000	100	
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional										
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	143.442.000	-	143.442.000		113.508.694		113.508.694	85,64	
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	254.600.000	275.400.000		12.800.000	262.500.000	275.300.000	100	
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	26.075.000	21.970.000		48.045.000	26.075.000	21.970.000	-	48.045.000	100	
E	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup										
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	8.835.000	52.800.000	58.450.000	120.085.000	8.835.000	52.800.000	58.450.000	120.085.000	100	
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	66.355.000	67.060.000	42.400.000	175.815.000	66.355.000	63.980.794	42.150.000	172.485.794	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam									
1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	3.540.000	285.990.000	3.500.000	293.030.000	-	252.044.000	3.500.000	293.030.000	100
2	Pengendalian Kerusakan Hutan dan lahan	1.770.000	115.780.000		117.550.000	-	115.775.000	-	117.545.000	100
3	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	19.225.000	369.187.500		388.412.500	19.225.000	365.545.000	-	384.770.000	100
4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	35.600.000	258.453.000		297.053.000	35.600.000	254.603.000	-	293.203.000	100
G	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup									
1	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	33.120.000	68.410.000	-	101.530.000	33.120.000	18.410.000	-	51.530.000	80,0
H	Program Peningkatan Pengendalian Polusi									
1	Pembangunan Tempat Pembuangan benda padat/Cair yang Menimbulkan Polusi	12.680.000	2.061.750.000	11.000.000	2.085.430.000	12.680.000	1.003.973.750	11.000.000	1.027.653.750	50
I	Program Pengelolaan Sampah									
1	Penyedia prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan		137.500.000	673.358.769	891.108.769		137.319.900	671.295.000	887.511.200	100
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	389.037.000	3.016.781.031		3.405.818.031	388.337.000	3.012.222.290	-	3.400.559.290	100
3	Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan	39.380.000	275.505.500		314.885.500	39.380.000	272.102.800		311.482.800	100
	JUMLAH	5.222.190.161	7.083.663.231	1.175.415.769	13.588.819.161	5.124.726.518	5.895.401.835	1.183.645.000	12.324.925.653	95,98

B.2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1. Program Dan Kegiatan

Kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup pada Tahun 2018 diarahkan pada :

- a. Efesinsi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- e. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
- f. Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- g. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- h. Penurunan tingkat pencemaran lingkungan
- i. Peningkatan Cakupan Layanan Persampahan.

Berdasarkan kebijakan tersebut telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan
 - 1.1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 1.2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 1.5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan
 - 2.1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 2.2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - 2.3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan
 - 3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan
 - 4.1. Pemantauan kualitas lingkungan
 - 4.2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
5. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan
 - 5.1. Pengendalian dampak perubahan iklim
 - 5.2. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
 - 5.3. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
 - 5.4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA
6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan
 - 6.1. Pengembangan data dan informasi lingkungan
7. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menyebabkan Polusi.
 - 7.1. Pengembangan data dan informasi lingkungan
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan
 - 8.1. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan
 - 8.2. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
 - 8.3. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan

2. Realisasi Program dan Kegiatan

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran yang transparan dan akuntabel.
 Untuk kegiatan ini telah disediakan anggaran sebesar Rp. 45.930.000,- dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 output : Terbayarnya jasa pelayanan informasi, komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan

outcome : 1. Pelayanan administrasi perkantoran

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Keuangan : Rp. 35.267.607,- (76,79 %)

Fisik : 100 %

b. Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp. 59.495.000,- dengan pencapaian indicator kinerja sebagai berikut :

Out put : Honor PPK, Bendahara dan Petugas entry RKA

Outcome : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Keuangan : Rp 58.415.000,- (98,18%)

Fisik : 100 %

c. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung penyediaan alat tulis kantor yang memadai. Untuk pelaksanaan kegiatan ini disediakan anggaran sejumlah Rp 50.325.000,- dengan capaian indicator kinerja sebagai berikut :

output : Alat Tulis Kantor yang memadai.

Outcome : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Realiasasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Keuangan : Rp 50.300.000,- (99,95%)

Fisik : 100%

d. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Untuk pelaksanaan kegiatan ini disediakan anggaran sejumlah Rp 10.321.000,- namun pada tahap APBD Perubahan anggaran meningkat menjadi Rp 79.626.000,- dengan capaian indicator kinerja sebagai berikut :

output : tersedianya alat listrik, alat kebersihan, bahan bangunan, dekorasi dan publikasi, penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor.

Outcome : terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Keuangan : Rp 79.369.000,- (99,68%)

Fisik : 100%

e. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dimaksudkan untuk perjalanan dinas ke Pusat Pengelolaan Ecoregion (PPE) Bali-Nusra yang merupakan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup di Bali untuk wilayah Bali Nusa Tenggara. Selain itu panggilan rapat koordinasi ke kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta dan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah untuk memenuhi undangan Rapat Koordinasi Teknis pelaksanaan perencanaan kegiatan bidang sanitasi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah disediakan anggaran sebesar

Rp 85.000.000,- dengan pencapaian indicator kinerja sebagai berikut :

Output : Terlaksananya Sinkronisasi program/kegiatan antara pusat dan daerah.

Outcome : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

Keuangan : Rp 85.000.000,- (100%)

Fisik : 100 %

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas dan operasional yang berjumlah 3 unit kendaraan roda 2, yang dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah disediakan anggaran sebesar Rp 67.025.000,- dengan pencapaian indicator kinerja sebagai berikut :

Output : 3 unit kendaraan dinas operasional roda 2.

Outcome : Meningkatnya kinerja SKPD

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Keuangan : Rp 66.425.000,- (99,10%)

Fisik : 100 %

- b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional yang berjumlah 12 unit terdiri dari 3 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 3 dan 8 unit kendaraan roda 2 yang dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas rutin Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah disediakan anggaran sebesar Rp 143.442.000,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Berlakunya STNK kendaraan dinas/operasional dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional.

Outcome : Kelancaran tugas-tugas kantor

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Keuangan : Rp 113.508.694,- (79,13%)

Fisik : 85,64%

- c. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelaksanaan tugas. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 275.400.000,- dengan capaian indikator sebagai berikut :

Output : Rehab Ruang Kerja dan Pembangunan Gedung Aula Kantor.

Outcome : Terwujudnya keamanan dan kenyamanan pelaksanaan tugas di dalam gedung kantor

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Keuangan : Rp 275.300.000,- (99,96)

Fisik : 100 %

- III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatannya adalah :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang akuntabel dan transparan serta pengukuran capaian sasaran program/kegiatan SKPD melalui evaluasi kinerja. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah disediakan anggaran sebesar Rp 48.045.000,- dengan pencapaian indicator kinerja sebagai berikut :

Output : Tersusunnya laporan kinerja SKPD (LAKIP,LKPJ, RENJA dan RKA) dan Renstra SKPD

Outcome : Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Keuangan : Rp 48.045.000,- (100%)

Fisik : 100 %

- IV. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan

- a. Pemantauan kualitas lingkungan

Pemantauan kualitas lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan, mendorong peran serta para pihak lain dalam pengelolaan SDA dan LH serta tersedianya data pemantauan kualitas lingkungan. Untuk indikator kinerja tersebut upaya yang dilakukan adalah dengan sistim sampling, pemantauan kualitas air sungai dan danau secara berkala, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi air yang ada pada media untuk menguji beberapa parameter kunci baik fisika, kimia maupun bakteriologi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah disediakan anggaran sebesar Rp. 120.085.000,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Tersedianya data kualitas air, udara, reagen dan alat laboratorium

Outcome : Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Realiasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

- Keuangan : Rp 120.085.000,- (100%)

- Fisik : 100 %

- b. Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

Pelaksanaan pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup dimaksud untuk mewujudkan pengelolaan terhadap upaya peningkatan penataan pengelolaan limbah terhadap pelaku usaha

dan/atau kegiatan. Untuk tercapainya program pemantauan pengelolaan dan pemantauan dilokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut disediakan anggaran sebesar Rp. 175.815.000,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : - laporan hasil pengawasan, pemantauan dan penataan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

- Laporan hasil verifikasi pengaduan kasus lingkungan hidup

- Laporan Hasil Pendataan Usaha dan/atau Kegiatan tidak memiliki dokumen Lingkungan

Outcome : Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

- Keuangan : Rp. 172.485.794,- (98,11%)

- Fisik : 100 %

V. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan :

a. Kegiatan Pengendalian dampak perubahan iklim dengan capaian program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan sarannya yaitu pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari kotoran ternak. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 293.030.000,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Bangunan unit biogas dan instalasinya, Data hasil penilaian kampung iklim

Outcome : Meningkatnya Kebersihan Lingkungan Pemilik Kandang, Terwujudnya usulan kampung iklim ke Provinsi dan Pusat

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

- Keuangan : Rp. 293.030.000,- (100%)

- Fisik : 100 %

b. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan dengan capaian dapat mengendalikan kerusakan hutan dan lahan yang timbul akibat perbuatan manusia dan sistem pengelolaan yang kurang baik sehingga mengakibatkan timbulnya bencana alam, dapat dicegah dengan pendekatan rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 117.550.000,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Bibit tanaman Konservasi di lahan BGGC di desa Karang sidemen, Sosialisasi reklamasi lahan bekas galian gol.c

Outcome : Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

- Keuangan : Rp. 117.545.000,- (99,99%)
- Fisik : 100 %

- c. Kegiatan Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air untuk mendukung capaian program peningkatan pelestarian cathment area sekitar mata air, meningkatnya efisiensi pemanfaatan air dan mata air untuk keperluan irigasi dan air bersih, meningkatnya air tanah lahan kritis dengan adanya embung penangkapan air serta meningkatnya air tanah. Untuk pelaksanaan tugas tersebut disediakan anggaran sebesar Rp. 388.412.500,- dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

Output : Bangunan Pengaman Sumber Mata Air, Bibit pohon Konservasi di sumber mata air dan Kemah bakti Konservasi SDA

Outcome : Perlindungan dan Konservasi SDA.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

- Keuangan : Rp. 384.770.000,- (99,06%)
- Fisik : 100 %

- d. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam untuk mendukung capaian program peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi sumber daya alam yang ada serta mampu berinovasi dalam rangka teknik konservasi yang ramah lingkungan dengan melakukan sosialisasi peraturan dan pelatihan - pelatihan. Untuk pelaksanaan tugas tersebut disediakan anggaran sebesar Rp. 297.053.000,- dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

Output : - Sosialisasi izin lingkungan di 5 kecamatan
- Pelatihan teknis Penyusunan laporan pelaksanaan dokumen lingkungan
- Bimbingan teknis pemanfaatan biogas
- Bimbingan teknis pengolahan sampah Prinsip 3 R dimasyarakat
- Bimbingan teknis pengolahan sampah Prinsip 3 R dilembaga pendidikan

Outcome : Meningkatnya perlindungan konservasi sumber daya alam.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

- Keuangan : Rp. 293.203.000,- (98,70%)
- Fisik : 100 %

VI. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan :

a. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan dengan tolok ukur capaian program tersedianya data dan informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkualitas sebagai bahan penyusunan program pengelolaan lingkungan hidup tahun berikutnya. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program tersebut adalah Pengembangan data dan informasi lingkungan.

Pengembangan data dan informasi lingkungan digunakan untuk mendukung kegiatan penyusunan buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Lombok Tengah. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah disediakan anggaran sebesar Rp. 101.530.000,- dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen SIKPLHD 2018

Outcome: Meningkatnya Kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Realisas sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

- Keuangan : Rp. 51.530.000,- (50,75%)

- Fisik : 80 %

VII. Program Program peningkatan pengendalian polusi dengan kegiatannya adalah :

a. Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya target 100-0-100 dalam bidang sanitasi. Wujud kegiatannya yaitu pembangunan IPAL Komunal. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah disediakan anggaran sebesar Rp 2.085.430.000,- dengan pencapaian indicator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen laporan hasil pemantuan kinerja IPAL komunal, Operasional TPS 3R

Outcome : Meningkatnya kualitas air limbah yang di olah IPAL, Terlaksananya Program Tangki Septic Air Limbah Setempat, Terlaksananya pengelolaan sampah di TPS 3R

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Keuangan : Rp 1.027.653.750,- (49,28%)

Fisik : 50 %

VIII. Program Pengelolaan Sampah melalui kegiatan :

- a. Kegiatan Penyedia Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan untuk memaksimalkan proses penanggulangan limbah sampah dan sampah B3 dengan penguatan fasilitas persampahan yang lebih memadai sehingga pengelolaan persampahan dapat tertangani dengan sebaik – baiknya .

Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 891.108.769,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Pengadaan Arm roll (1 unit), Pengadaan Pick-Up (1 unit), Pengadaan Sepeda Motor (3 unit), Pembuatan landasan Container (7 buah), Pembuatan TPS di Kelurahan Tiwugalih (1 paket)

Outcome : Meningkatnya Pelayanan pengelolaan sampah

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

- Keuangan : Rp. 887.511.200,- (99,60%)
- Fisik : 100 %

- b. Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan dengan capaian dapat menjaga kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Persampahan sehingga memberikan kenyamanan bagi petugas untuk bekerja secara maksimal guna terpenuhinya lingkungan bebas sampah. Untuk kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 3.405.818.031,- dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasaranan Untuk Mendukung Kegiatan Pengelolaan Persampahan, Terlaksananya Pemeliharaan dan pengoperasian sarana dan prasarana persampahan.

Outcome : Meningkatnya Pelayanan pengelolaan sampah.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

- Keuangan : Rp. 3.400.559.290,- (99,85%)
- Fisik : 98,87 %

- c. Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan untuk mendukung terpenuhi pengelolaan sampah yang baik dan berbasis lingkungan dengan peningkatan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengembangan teknologi pengelolaan persampahan.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut disediakan anggaran sebesar Rp. 314.885.500,- dengan pencapaian indikator sebagai berikut :

Output : Pengadaan TPS, Sosialisasi pengelolaan Limbah B3 bagi sarana Kesehatan, Sosialisasi Perda No.5 Tahun 2015

Outcome : Meningkatnya Pelayanan pengelolaan sampah.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah :

- Keuangan : Rp. 311.482.800,- (98,92%)
- Fisik : 100 %

3. Permasalahan dan solusi

Uraikan, apabila ada masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan apa solusi yang ditempuh. Apabila tidak ada masalah, sebutkan tidak ada masalah.

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - Sebagian kendaraan operasional yang berasal dari UPT Kebersihan dan Pertamanan yang diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup tidak disertai dengan kelengkapan STNK sehingga belum semua pajak kendaraan tersebut bisa dibayar, dengan demikian target penyerapan anggaran tidak bisa terrealisasi semua.
- b. Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Lingkungan
 - Salah satu output yang tidak tercapai adalah Penyusunan KLHS untuk mendukung kegiatan penyusunan RDTR Kota Praya, hal ini disebabkan kegiatan penyusunan KLHS tersebut dilaksanakan oleh Dinas teknis terkait, namun demikian sesuai dengan pedoman penyusunan KLHS maka Ketua Pokja Penyusunan KLHS tetap dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- c. Kegiatan Pembangunan Tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
 - Output kegiatan yang tidak terpenuhi adalah Program Tangki Septic Air Limbah Setempat yang anggarannya bersumber dari dana hibah kementerian PUPR berupa penyediaan tangki septik untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kendala yang terjadi adalah Pihak ke tiga selaku pemenang tender pengadaan tangki septik tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya selaku penyedia sehingga dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK.

4. Solusi

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - Berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu penanggungjawab barang pada Dinas PU dan Bidang Aset untuk melengkapi dokumen administrasi kendaraan yang STNKnya belum ditemukan.
- b. Kegiatan Pengembangan data dan Informasi Lingkungan
 - Kegiatan terkait tidak dilakukan realisasi.
- c. Kegiatan Pembangunan Tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

- Berkonsultasi dengan BPK-P, Inspektoran dan Pihak terkait pada Kementerian PUPR untuk menentukan tindaklanjut yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

5. Pencapaian SPM (di isi oleh SKPD yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar)

Sesuai dengan Permendagri No.78 Tahun 2017 bahwa Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar sehingga tidak ada SPM yang wajib dilaksanakan.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2018

Standar Operasioanal Prosedur yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

NO	JENIS SOP	DASAR HUKUM PENETAPAN SOP	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI
1	Pembuatan UKL/UPL	- PP no 12 tahun 2012 - Permen LH No.16 Tahun 2012 - Permen No.17 Tahun 2012	Penerbitan rekomendasi UKL/UPL tidak bersamaan dengan penerbitan ijin lingkungan karena pejabat yang menandatangani berbeda	Perlu adanya delegasi wewenang penandatanganan ijin lingkungan dari Bupati ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Dokumen SPPL	- PP no 27 tahun 2012 - UU No. 32 Tahun 2009	Tidak ada	
3	Pengaduan Kasus	- PP no 12 tahun 2012 - Permen LH No.16 Tahun 2012 - Permen LH No.9 Tahun 2010	Kurangnya jumlah tenaga fungsional bidang lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga fungsional bidang lingkungan hidup
4	Penanganan Sampah Rumah Tangga	- UU.RI No. 18 Tahun 2008 - Perda Kab. Lombok Tengah No. 5 Tahun 2015	Tidak ada	

5	Penyapuan Jalan	- UU.RI No. 18 Tahun 2008 - Perda Kab. Lombok Tengah No. 5 Tahun 2015	Tidak ada	
6	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (P2LH)	- SE. Mendagri No. 52 Tahun 2011	Tidak ada	

B.3. Capaian Kinerja Sasaran Urusan

Tabel 2.3.
Tabel Capaian Kinerja Sasaran

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISASI 2018
1	Terpantaunya tingkat pencemaran lingkungan meliputi air, udara dan tanah	Pemantauan kualitas air permukaan	12 titik	12 Titik
		Pemantauan kualitas udara embien	4 Titik	4 Titik
2	Terlaksananya penangan pengaduan dan Pengawasan izin lingkungan	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan	85	87
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%
3	Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan (amdal, UPL/UKL dan SPPL)	500 dokumen	626 dokumen
4	Penurunan laju kerusakan LH yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, serta ekosistem pesisir dan laut	Perlindungan dan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	5 lokasi	3 lokasi
		Pengendalian dan konservasi SDA	19 ha	16 ha

Analisis Pencapaian Kinerja

Target yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran anatar lain :

Penjelasan Pencapaian sasaran nomor 1 yaitu Terpantaunya tingkat pencemaran lingkungan meliputi air, udara dan tanah

Pencapaian target tersebut didukung oleh indikator Cakupan titik pantau kualitas air, udara dan media lingkungan lainnya

Penyebab tercapainya sasaran antara lain tersedianya sarana prasarana laboratorium lingkungan hidup yang memadai dan didukung peningkatan tenaga laboratorium

Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pemantauan kualitas lingkungan hidup
- Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium
- Diklat teknis pemantauan kualitas lingkungan

Penjelasan Pencapaian sasaran nomor 2 yaitu Terlaksananya penanganan pengaduan dan Pengawasan izin lingkungan

Pencapaian target tersebut didukung oleh indikator Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Penyebab tercapainya sasaran antara lain :

- Terbentuknya tim pengawasan pelaksanaan izin lingkungan
- Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat

Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Kegiatan pengawasan pelaksanaan izin lingkungan oleh tim pengawasan
- Sosialisasi dan edukasi tentang penyusunan laporan pelaksanaan izin lingkungan
- Pembentukan Pos Pengaduan Masyarakat

Penjelasan Pencapaian sasaran nomor 3 yaitu Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Pencapaian target tersebut didukung oleh indikator Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan (amdal, UPL/UKL dan SPPL)

Penyebab tercapainya sasaran antara lain :

- Meningkatnya kesadaran penanggungjawab usaha/kegiatan untuk mengurus izin lingkungan terhadap kegiatan usaha yang dilaksanakan
- Terlaksananya sosialisasi dan edukasi kelompok masyarakat terhadap manfaat izin lingkungan
- Terlaksananya SOP perizinan bidang lingkungan hidup dengan baik

Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Koordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
- Pelaksanaan sosialisasi perizinan bidang lingkungan hidup

Penjelasan Pencapaian sasaran nomor 4 yaitu Penurunan laju kerusakan LH yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi, serta ekosistem pesisir dan laut

Pencapaian target tersebut didukung oleh indikator Perlindungan dan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air dan Cakupan data/informasi SDA dan LH, Pengendalian dan konservasi SDA

Penyebab tercapainya sasaran antara lain :

- Meningkatnya perhatian dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam khususnya di lokasi mata air
- Koordinasi dengan pihak terkait yaitu pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan dan kelompok masyarakat

Program kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pembangunan kolam perlindungan mata air
- Penanaman pohon konservatif

BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah yang dapat disusun untuk dijadikan bahan evaluasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil tinjauan secara umum terhadap aspek keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan program dan kegiatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum capaian kinerja program maupun kegiatan telah sesuai dengan target yang direncanakan.
2. Telah melakukan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan semua cakupan pekerjaan seperti pengelolaan lingkungan hidup, perijinan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati lingkungan dan persampahan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Sampah (KMPS).
3. Melakukan penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dengan pendekatan yang sistematis dan berkesinambungan sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (berbasis kinerja).
4. Perlunya penambahan personalia yang berkompentensi pada bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah untuk menyeimbangkan penyelesaian masalah yang semakin kompleks.
5. Perlu adanya dukungan dari semua pihak seperti legislatif, badan / instansi lain untuk mengakomodir perencanaan dan kebutuhan yang mungkin sangat diperlukan, perlunya pula peran masyarakat secara langsung dalam usaha melestarikan fungsi lingkungan hidup sebab permasalahan lingkungan hidup dan persampahan sudah tidak hanya di instansi lingkungan hidup semata tetapi bisa menjangkau lintas sektoral bahkan lintas wilayah administratif. Upaya strategis yang dapat dilakukan antara lain dengan mewujudkan berbagai regulasi serta memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tentang lingkungan hidup, Pengelolaan sampah limbah dan limbah B3 dan lain sebagainya.

Akhirnya atas perhatian dan kontribusi semua pihak dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) disampaikan terima kasih.

LAMPIRAN